

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pariwisata merupakan jenis industri baru yang dapat membantu percepatan tumbuhnya perekonomian dan peningkatan penghasilan, standar hidup, penyediaan lapangan kerja, serta menstimulasi bidang-bidang produktif lainnya. Sebagai jenis industri yang kompleks pariwisata juga membantu industri-industri klasik seperti industri *homemade* dan cinderamata, bisnis transportasi dan penginapan. Sektor pariwisata juga mampu mengembangkan sokongan bagi kemajuan pembangunan daerah seperti pembangunan dermaga (laut dan udara), perbaikan jalan, sistem transportasi setempat, program-program kesehatan atau kebersihan, itu semua mampu menimbulkan *feedback* yang positif bagi warga masyarakat yang ada di lingkup daerah pengembangan pariwisata tersebut maupun bagi wisatawan luar.¹

Pengelolaan pariwisata sangat berkaitan dengan pengembangan pariwisata dalam menjual objek daya tarik wisata wilayahnya. Dalam pengelolaan pariwisata pemerintah tidak dapat bergerak sendiri dalam mengelola objek wisata, dibutuhkannya bantuan dari pihak lainnya seperti pihak swasta dan masyarakat untuk membantu pemerintah dalam mengelola dan mengembangkan daerah wisata. Hal ini dilakukan karena untuk mengelola potensi pariwisata harus dilakukan dengan optimal, melihat banyaknya sumber daya alam yang berpotensi menjadi daerah wisata. Keuntungan dari pengelolaan daerah wisata yang tepat akan meningkatkan perekonomian yang masuk dan juga memajukan daerah tersebut. Untuk itu dalam pengelolaan wisata di suatu daerah dibutuhkan peran dan kontribusi dari *stakeholders*.

Stakeholder disini memiliki peranan penting dalam pengembangan suatu objek wisata. *Stakeholder* merupakan suatu individu ataupun kelompok organisasi yang memiliki kepentingan, keterlibatan dan pengaruh oleh kegiatan program pembangunan.¹ Dalam setiap kegiatan pembangunan, para *stakeholder* memiliki sumber daya dan kepentingan masing-masing yang harus terwakili dalam proses pengambilan keputusan, sehingga pengembangan pariwisata suatu daerah dapat terealisasi dengan optimal. Adapun Rahmi mengatakan dalam suatu pengembangan pariwisata ada tiga *stakeholder* yang sangat penting, yaitu pemerintah, swasta, dan masyarakat. *Stakeholders* memiliki peranan penting dalam pengembangan pariwisata, tanpa adanya peran dari *stakeholders* setempat, pengembangan pariwisata di daerah tidak dapat berjalan dengan maksimal. “Keterlibatan peran *stakeholder* menghasilkan perencanaan strategi pariwisata yang diterima dengan baik, menghindari konflik yang timbul selama kebijakan dan menyatukan mereka yang secara langsung dan tidak langsung terlibat dalam pariwisata”.²

Upaya dalam pengelolaan pariwisata tentu harus melalui rancangan-rancangan atau aturan yang sudah ditetapkan dalam peraturan pengelolaan pariwisata dan juga penentuan aktor-aktor yang berperan dalam strategi pengelolaan pariwisata. Selain itu, juga adanya alur koordinasi dalam pelaksanaan pengelolaan wisata mulai dari perencanaan hingga evaluasi. Hal ini dilakukan dengan tujuan dalam pengelolaan pariwisata dapat terkoordinasi dengan pemerintah dan pihak-pihak yang ikut andil dalam upaya pengelolaan pariwisata. Keterkaitan dalam alur koordinasi dapat juga dikaitkan dengan pemerintah dan *stakeholders*.

¹ Ginting, G., Kismartini, K., Yuniningsih, T., & Afrizal, T. (2022). *Analisis Peran Stakeholders dalam Pengembangan Pariwisata Siosar*. *PERSPEKTIF*, 11(1), 8-15.

² Bibin, M. Vitner & Imran. (2018). *Analysis of Stakeholder in The Development of Lambobo Beach Sustainable Town in Palopo City*. *Jurnal Masyarakat, Kebudayaan dan Politik*. 31 (1): 62-71.

Dalam *collaborative governance*, pemerintah berperan sebagai fasilitator yang memfasilitasi dan kolaborasi antara *stakeholder*. Pemerintah juga bertanggung jawab untuk menyediakan kebijakan, sumber daya, dan regulasi yang diperlukan untuk mendukung pengelolaan pariwisata. Kolaborasi antara pemerintah dan *stakeholder* lainnya sangat penting dalam memastikan pengambilan keputusan yang inklusif, transparan, dan akuntabel. Keterkaitan *stakeholder* dengan *collaborative governance* terletak pada peran aktif mereka dalam proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan kegiatan terkait pengembangan pariwisata. *Stakeholder* dalam konteks ini termasuk pemerintah daerah, komunitas lokal, organisasi pariwisata, sektor swasta, akademisi, dan masyarakat umum. Masing-masing *stakeholder* memiliki kepentingan dan pengetahuan yang berbeda-beda terkait dengan pengelolaan pariwisata.³

Terkait *collaborative governance* dalam pengembangan serta pengelolaan daerah wisata pada umumnya dikelola oleh pemerintah. Akan tetapi ketika kebutuhan masyarakat akan pelayanan pariwisata semakin meningkat, hal tersebut tidak diimbangi oleh peran pemerintah. Justru hal yang terjadi adalah sebaliknya, peran pemerintah justru semakin terbatas. Oleh sebab itu diperlukan pihak-pihak yang mampu mengakomodasi kebutuhan dari wisatawan.⁴

Pemerintah Kota Jambi terus berusaha mengembangkan sebuah objek destinasi wisata yakni Kampung Bantar yang akan di kembangkan menjadi kampung wisata.⁵ Kampung wisata merupakan suatu bentuk integrasi antara potensi daya tarik wisata alam, wisata buatan dan wisata budaya dalam satu kawasan tertentu dengan didukung

³ Saputra, D. (2020). *Tatakelola Kolaborasi Pengembangan Kampung Wisata Berbasis Masyarakat. government: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 13(2), 85-97.

⁴ Mirza, R., Universitas, D., & Mada, G. (2017). *Analisis Penerapan Collaborative Governance dalam Pengelolaan Pariwisata Bencana Lava Tour. Forum Ilmu Sosial*, 44(1), 43-54

⁵ Ampar.id. *Pemkot Jambi Kampung Bantar Bakal Jadi Kampung Wisata*. <https://ampar.id/> diakses pada 28 Oktober 2022 pukul 20.51 WIB.

atraksi, akomodasi dan fasilitas lainnya yang telah dilembagakan dan dikelola oleh pemerintah kelurahan bersama masyarakat. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Jambi akan mengembangkan tujuh kampung wisata sebagai fokus pengembangan pariwisata pada 2023 untuk meningkatkan jumlah wisatawan. Kabid Daya Tarik Pariwisata Dinas Pariwisata Kota Jambi Nanang Sunarya menyebutkan kedelapan kampung wisata tersebut yakni Kampung Wisata Berdaya Ekajaya, Kampung Wisata Berseri Eka Jaya, Kampung Wisata Makalam, Kampung Wisata Danau Sipin, Kampung Wisata Rentang Buluran, Kampung Wisata Umah Sinau, dan Kampung Organik Tanjung Sari.⁶

Tabel 1.1. Kampung Wisata Kota Jambi Tahun 2023

No	NAMA	ALAMAT
1.	Kampung Wisata Baselang Bakung Jaya	Kel. Bakung Jaya
2.	Kampung Wisata Berseri	Kel. Eka Jaya
3.	Kampung Wisata Buluran Kenali	Kel. Buluran Kenali
4.	Kampung Herbal	Kel. Mudung Laut
5.	Kampung Wisata Makalam	Kel. Sungai Asam
6.	Kampung Wisata Danau Sipin	Kel. Telanaipura
7.	Kampung Wisata Tanjung Sari	Kel. Tanjungsari
8.	Kampung Wisata Pacinan	Jambi Kota Seberang

⁶ Tuyani. *Kota Jambi Kembangkan Tujuh Kampung Wisata*.
<https://jambi.antaranews.com/berita/537492/kota-jambi-kembangkan-tujuh-kampung-wisata> diakses pada 23 juni 2023 pukul 20.51 WIB.

Dari kedelapan kampung wisata yang ada, Kampung wisata Eka Jaya merupakan yang pertama kali terbentuk dari beberapa kampung wisata lainnya. Keunggulan kampung wisata Eka Jaya dibandingkan kampung wisata lainnya yakni kampung wisata Eka Jaya sudah menjalin kemitraan dengan berbagai pihak untuk mengembangkan kampung wisata tersebut, sedangkan kelurahan lainnya belum mempunyai mitra. Sebagaimana yang dikatakan oleh Bapak Nanang Sunarya selaku Kepala Bidang Daya Tarik Destinasi Pariwisata Kota Jambi :

“Kampung wisata di kota jambi yang pertama kali terbentuk yaitu kampung wisata berseri dan berdaya yang berada di Kelurahan Eka Jaya, dan pokdarwis bersama pihak Kelurahan Eka Jaya telah menjalin pola kemitraan dengan berbagai pihak seperti Pertamina DPPU Sulthan Thaha, Rumah Zakat, dan lain sebagainya. Mereka cukup handal dalam hal membangun jejaring kemitraan dan pengelolaan manajemen kemitraan dan ini belum dimiliki oleh kampung wisata yang berada di kelurahan lainnya.”⁷

Lebih lanjut lagi, Kelurahan Eka Jaya merupakan wisata perkotaan yang terbentuk dari pengembangan program Kampung Bersih, Aman, dan Pintar (BANTAR), wisata perkotaan itu terdiri dari kampung wisata berdaya dan kampung wisata berseri.⁸ Dalam mengembangkan program kampung wisata Kelurahan Eka Jaya menjalin kemitraan diantaranya kampung wisata berseri bermitra dengan Pertamina DPPU Sulthan Thaha, kampung wisata berdaya bermitra dengan Rumah Zakat. Wisatawan yang berkunjung ke kampung wisata tidak hanya dapat menikmati wisata alam saja namun juga dapat merasakan bagaimana kehidupan sosial masyarakat di kampung tersebut seperti budaya, religi, kuliner, UMKM, dan kriya.

Kelurahan Eka Jaya merupakan salah satu kelurahan yang berada di Kecamatan Paal Merah Kota Jambi, Kelurahan yang terdiri dari 65 Rukun Tetangga dengan luas

⁷ Hasil wawancara bersama Kepala Bidang Daya Tarik Destinasi Pariwisata Kota Jambi pada tanggal 28 Maret 2023 Pukul 13.30 WIB.

⁸ Ibid

wilayah 873,00 Ha. Kelurahan Eka Jaya banyak memunculkan inovasi-inovasi, salah satunya ialah inovasi gerakan kampung wisata di setiap lingkungan RT yang berada di Kelurahan Eka Jaya dengan membentuk sejumlah RT dalam dua kelompok yaitu Kampung Wisata Berdaya yang bermitra dengan Rumah Zakat dan Kampung Wisata Berseri yang bermitra dengan Pertamina DPPU Sulthan Thaha. Karena adanya pemekaran wilayah dari sebagian wilayah Kelurahan Talang Bakung dan Kelurahan Eka Jaya Kampung wisata berdaya sekarang tergabung dalam kelurahan Bakung Jaya. Kelurahan Eka Jaya memiliki kelembagaan yang berperan aktif dalam mengembangkan Kampung Wisata seperti Kelompok Sadar Wisata (POKDARWIS), Pertamina DPPU Sulthan Thaha, Rumah Zakat, dan lain sebagainya.

Namun ada beberapa kendala dalam pengelolaan kampung wisata berseri di Kelurahan Eka Jaya berdasarkan hasil observasi awal yang di lakukan oleh peneliti yaitu.

No.	Beberapa kendala dalam pengelolaan kampung wisata berseri	
1.	ketergantungan terhadap mitra eksternal	Belum mandiriya POKDARWIS dalam pengelolaan wisata, dalam hal lain seperti pelatihan, anggaran, yang masih terbatas.
2.	Kualitas Sumber Daya Manusia	Penyiapan dalam mengelola kampung wisata berseri masih terbatas

Inilah tantangan yang dihadapi pemerintah kelurahan, masyarakat, maupun sumber daya lokal yang ada di Kelurahan Eka Jaya tersebut. Kapasitas pemerintah

kelurahan serta kelembagaan yang ada di Kelurahan Eka Jaya sangat diperlukan dalam upaya mengembangkan kampung wisata dan mengatasi hambatan-hambatan yang ada agar kelurahan Eka Jaya bisa berkembang menjadi kampung wisata yang unggul dan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sebagaimana yang dikatakan oleh Bapak Abdul Salim selaku Lurah Eka Jaya :

“Jika berbicara mengenai kampung wisata tentu ada potensi yang diandalkan. Kalau kita menunggu yang sudah ada itu lain cerita seperti Danau Sipin itu kan sudah disiapkan oleh pemerintah, kalau sudah disiapkan kita tinggal hanya menjalankan saya rasa dak sulit. Tapi kita yang menyiapkan dari awal, kita yang memunculkan ide dari awal itu emang agak berat, perlu keberanian.”⁹

Penelitian terdahulu adalah upaya peneliti untuk mencari perbandingan dan selanjutnya untuk menemukan inspirasi baru untuk penelitian. Pada bagaian ini peneliti mencantumkan berbagai hasil penelitian terdahulu terkait dengan penelitian yang hendak dilakukan, kemudian membuat ringkasannya. Berikut merupakan penelitian terdahulu yang masih terkait dengan tema yang penulis kaji. Sebelum penerapan *collaborative governance* dalam pengelolaan Kampung Wisata Berseri di Kelurahan Eka Jaya, beberapa penelitian terdahulu telah dilakukan peneliti untuk memahami isu-isu terkait pengembangan pariwisata perkotaan dan pengelolaan lingkungan di Indonesia.

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Andi Hariadi dengan judul “*Collaborative Governance* Dalam Pengelolaan Pariwisata Pantai Pasir Putih Bira Kabupaten Bulukumba” pada tahun 2019 dengan menggunakan metode penelitian kualitatif, di penelitian ini peneliti mengkaji bahwa proses pengelolaan pariwisata pantai pasir putih Bira Kabupaten Bulukumba. Dalam pergerakan prinsip bersama pengungkapan sudah cukup baik karena melibatkan pihak lain, namun dalam

⁹ Hasil wawancara bersama Lurah Eka Jaya pada tanggal 18 Juli 2022 pukul 10.00 WIB.

deliberasi belum berjalan dengan baik karena jarang melakukan diskusi. Kapasitas melakukan tindakan bersama dalam pengelolaan pariwisata pantai pasir putih Bira Kabupaten Bulukumba sudah baik dari dimensi prosedur dan kesepakatan bersama namun belum baik dari dimensi kepemimpinan, pengetahuan dan sumber daya.¹⁰ Perbedaan penelitian terdahulu diatas dengan penelitian ini yaitu pada lokasi penelitian, dimana penelitian ini berada di Eka Jaya.

Pada penelitian kedua yang dilakukan oleh Zahratun Aeni dan Retno Sunu Astuti dengan judul “*Collaborative Governance* Dalam Pengelolaan Kepariwisata Yang Berkelanjutan (Studi Pada Kegiatan Pesta Rakyat Simpedes Tahun 2019 Di Kabupaten Pati)”. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pariwisata merupakan salah satu bidang yang sangat menjanjikan untuk mendukung pembangunan ekonomi suatu daerah sebagai salah satu Pendapatan Asli Daerah (PAD), pemerintah dan swasta maupun Badan Usaha Milik Negara (BUMN) harus memiliki sinergisitas dalam merumuskan perencanaan strategi dalam pengembangan pariwisata yang ada di daerah.¹¹ Pembeda penelitian terdahulu diatas dengan penelitian ini terletak pada objek dan lokasi penelitian, yang berfokus pada kepariwisataan berkelanjutan.

Penelitian ketiga yang dilakukan oleh Aziz Ar Rasyid dan Ardianto yang berjudul “*Collaborative Governance* Dalam Pengembangan Objek Wisata Toluk Jangkang Di Kecamatan Tualang Kabupaten Siak” pada tahun 2021. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa wisata toluk jangkang merupakan wisata yang memiliki konsep berwisata memadukan diam dengan budaya lokal. Konsep

¹⁰ Hariadi, A. (2019). *Collaborative Governance Dalam Pengelolaan Pariwisata Pantai Pasir Putih Bira Kabupaten Bulukumba*. Universitas Muhammadiyah Makassar.

¹¹ Aeni, Z., & Astuti, R. S. (2019, November). *Collaborative Governance Dalam Pengelolaan Kepariwisata Yang Berkelanjutan (Studi Pada Kegiatan Pesta Rakyat Simpedes Tahun 2019 Di Kabupaten Pati)*. In Conference on Public Administration and Society (Vol. 1, No. 01).

Collaborative Governance sangatlah berperan penting karena dalam penerapannya tidak hanya melibatkan antara pemerintah dan non pemerintah saja melainkan pihak-pihak lain.¹² Perbedaan penelitian terdahulu diatas dengan penelitian ini terletak pada fokus penelitian, yang dimana penelitian diatas membahas tentang pengembangan objek wisata.

Hasil studi literatur pada penelitian yang telah dilakukan sebelumnya menunjukkan bahwa belum diketahui secara pasti perbedaannya dengan penelitian terdahulu yang telah disebutkan sebelumnya. Namun, dengan menggunakan metode *collaborative governance* dalam pengelolaan kampung wisata berseri di Kelurahan Eka Jaya, maka penelitian tersebut dapat memiliki perbedaan dalam pendekatan, metode, hasil, dan rekomendasi dari penelitian terdahulu. Penelitian pada judul tersebut juga fokus pada pengelolaan kampung wisata berseri, yang dapat berbeda dengan penelitian terdahulu yang berfokus pada pengelolaan objek wisata lainnya.

Berdasarkan tinjauan studi literatur yang telah dilakukan sebelumnya terdapat perbedaan yaitu kampung wisata di Kelurahan Eka Jaya di dasari dari pengembangan program kampung BANTAR dan masih dalam tahap rintisan, Indikator-indikator yang dirasa cocok untuk mengukur kemampuan dan kapasitas organisasional para pengelola Pariwisata Kelurahan Eka Jaya yang mengacu pada pendapat Ansell dan Gash yaitu dalam pengelolaan wisata dapat membantu menciptakan lingkungan kolaboratif yang memungkinkan untuk bekerja sama menuju tujuan bersama, sambil mempertimbangkan keberlanjutan, keadilan dan partisipasi aktif dari masyarakat lokal. Sebagai langkah penting dalam menjaga keberlanjutan destinasi pariwisata dan

¹² Aziz Ar Rasyid dan Adianto (2021) , *Collaborative Governance Dalam Pengembangan Objek Wisata Toluk Jangkang Di Kecamatan Tualang Kabupaten Siak.*

menjaga keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan pelestarian lingkungan serta budaya.

Dari latar belakang diatas, dapat diketahui bahwa pengelolaan Kampung Wisata dipengaruhi oleh aspek *collaoborative governance*. *Collaborative governance* merupakan salah satu komponen penting dalam menunjang keberhasilan pariwisata. Pada aspek *collaborative governance*, diperlukan kapasitas masyarakat, baik dalam bentuk organisasi maupun individu sebagai pelaku utama dalam pengelolaan kampung wisata untuk pelaksanaan pengelolaan kampung wisata. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan kapasitas pemerintah, kelurahan dan masyarakat dalam pengelolaan Kampung Wisata Berseri di Kelurahan Eka Jaya Kecamatan Paal Merah. Berdasarkan uraian masalah diatas maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “**COLLABORATIVE GOVERNANCE DALAM PENGELOLAAN KAMPUNG WISATA BERSERI DI KELURAHAN EKA JAYA**” .

1.2 Perumusan Masalah

Perumusan masalah bertujuan untuk menegaskan kembali masalah-masalah yang akan diteliti, sehingga dapat menentukan pemecahan masalah yang tepat dan mencapai tujuan dari penelitian, berdasarkan hal tersebut, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

- 1 Bagaimana implementasi *collaborative governance* dalam pengelolaan kampung wisata berseri di Kelurahan Eka Jaya?
- 2 Bagaimana output dalam pengelolaan kampung wisata berseri di Kelurahan Eka Jaya?

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan mencapai tujuan agar peneliti dapat memberikan manfaat sesuai dengan yang diharapkan, adapun tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengatasi atau menganalisis *collaborative governance* dalam pengelolaan kampung wisata berseri di Kelurahan Eka Jaya, termasuk proses kolaborasi antara berbagai *stakeholder* yang terlibat, mekanisme koordinasi, serta pembagian tanggung jawab dan peran.
2. Mengidentifikasi faktor-faktor pendukung dan penghambat implementasi *collaborative governance* dalam pengelolaan kampung wisata berseri di Kelurahan Eka Jaya, termasuk faktor internal seperti komitmen dan partisipasi *stakeholder*, serta faktor eksternal seperti regulasi dan kebijakan yang mendukung atau membatasi implementasi *collaborative governance*.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat diantaranya yakni:

1. Bagi Penulis

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk meningkatkan pemahaman penulis mengenai persiapan, penerapan, dan evaluasi dalam pengembangan kampung wisata perkotaan untuk memaksimalkan hasil dari implementasi yang telah ada

2. Bagi Pemerintah Daerah

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk memberikan masukan dan gambaran bagi pihak pemerintah tentang pentingnya mengatur, mengawasi, dan memajemen kapasitas lembaga dalam pengembangan wisata perkotaan di Kelurahan Eka Jaya serta memunculkan partisipasi masyarakat

setempat agar mendapatkan hasil yang maksimal dan menerapkan pemerintah daerah yang inovatif.

3. Bagi pengembangan ilmu

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk melengkapi penelitian yang ada sebelumnya serta mengoptimalkan hasil dari penelitian yang ada sebelumnya.

1.5 Landasan Teori

Teori merupakan landasan peneliti yang akan digunakan dalam menganalisis masalah yang ditemukan dilapangan. Sejumlah teori akan digunakan untuk mendiskripsikan indikator dan mengidentifikasi masalah serta alat dari peneliti untuk memecahkan masalah di lapangan sesuai dengan variabel dan topik penelitian. Berikut teori yang peneliti gunakan :

1.5.1 *Collaborative Governance*

Collaborative governance menurut Ansell dan Gash adalah serangkaian pengaturan dimana satu atau lebih lembaga publik yang melibatkan secara langsung *stakeholders non-state* didalam proses pembuatan kebijakan yang bersifat formal, berorientasi konsensus dan deliberatif yang bertujuan untuk membuat atau mengimplementasikan kebijakan publik atau mengatur program publik atau asset.

Konsep *collaborative governance* merupakan salah satu konsep pemerintahan yang dilakukan secara kolaboratif. Menurut pendapat Ansell dan Gash. “*Collaborative governance is therefore a type of governance in which public and private actor work collectively in distinctive way, using particular processes, to establish laws and rules for the provision of public goods*”. Dan

collaborative governance merupakan salah satu tipe governance. Pada pelaksanaan konsep *collaborative governance* terlihat pentingnya kerja sama sektor publik dan sektor private dengan cara tertentu, sehingga dapat menghasilkan regulasi dan kebijakan yang efektif dan tepat sasaran bagi masyarakat.¹³ Dalam penyelenggaraan negara, aktor publik, dan aktor privat saling bekerja sama untuk mencapai tujuan kepentingan publik.

Istilah *Collaborative Governance* merupakan cara pengelolaan pemerintah yang melibatkan secara langsung pemangku kepentingan diluar pemerintah atau negara, berorientasi pada konsensus dan musyawarah dalam proses pengambilan keputusan kolektif yang bertujuan untuk membuat atau melaksanakan kebijakan publik serta program-program publik.¹⁴ Dapat dipahami bahwa *collaborative governance* merupakan cara pengelolaan suatu hal yang melibatkan semua pemangku kepentingan baik secara langsung, maupun tidak langsung, berorientasi dan terjadi musyawarah dalam proses pengambilan keputusan dalam rangka mencapai tujuan bersama.

Proses dari kolaborasi dilakukan di dalam beberapa tahapan. suatu tahapan model kolaborasi menjadi penting untuk diperhatikan sebagai strategi dalam aspek suatu pengelolaan suatu urusan publik. Meskipun proses kolaboratif sulit untuk dilaksanakan karena karakter-karakter dari setiap stakeholder yang berbeda satu dengan yang lainnya.¹⁵ Menurut Ansell dan Gash model *collaborative governance* merupakan serangkaian komponen-komponen yang

¹³ Ansell, Chris., & Gash, Alison. (2008). *Collaborative Governance in Theory and Practice*. *Journal of Public Administration Research and Theory*, 18(4), 543-571.

¹⁴ Hardi, W. (2020). *Collaborative Governance Dalam Perspektif Administrasi Publik*.

¹⁵ Zulfa, I., Fandik, A., Satriaji, I., & Oktavian, D. (2022). *Model Collaborative Governance Dalam Pencegahan Korupsi Dana Desa Di Indonesia*. *Sosio Yustisia: Jurnal Hukum dan Perubahan Sosial*, 2(1), 107-139.

berjalan membentuk suatu siklus, mempengaruhi satu sama lain, dan pada intinya adalah proses *collaborative decision-making* diantaranya sebagai berikut:

1. Dialog antar-muka (*Face-to-Face Dialogue*)

Menurut Ansell and Gash, dibangun melalui dialog atau komunikasi secara tatap muka antar pemangku kepentingan (stakeholders). Proses dari *Collaborative Governance* berorientasi pada konsensus atau kesepakatan, maka komunikasi dengan tatap muka merupakan tahap yang sangat penting pada proses kolaborasi. Proses tatap muka ini adalah inti dari proses membangun kepercayaan, saling menghormati, pemahaman bersama, dan komitmen terhadap proses.

2. Membangun kepercayaan (*Trust Building*)

Kegiatan yang terus menerus dilakukan dan perlu ditingkatkan. Membangun kepercayaan merupakan syarat untuk membangun kolaborasi yang solid. Membangun kepercayaan adalah proses yang memakan waktu dan membutuhkan komitmen jangka panjang untuk mencapai hasil kolaborasi.

3. Komitmen pada proses kolaborasi (*Commitment to the Process*)

Komitmen merupakan komponen penting sekaligus tantangan utama dalam proses kolaborasi. Komitmen dipengaruhi oleh komponen sebelumnya (membangun kepercayaan). Sedangkan faktor (di dalam komponen) yang mempengaruhi adalah adanya mutual *recognition* (mengenal bersama yang bersifat mutual) dan *joint appreciation* (apresiasi bersama) antar aktor. Selain itu, adanya *ownership the process*

(rasa memiliki pada proses) yang diwujudkan dengan adanya pengaruh setiap aktor dalam memberi keputusan merupakan pendorong komitmen, namun memiliki dilemma, karena adanya perbedaan dan kompleksitas dalam kolaborasi.

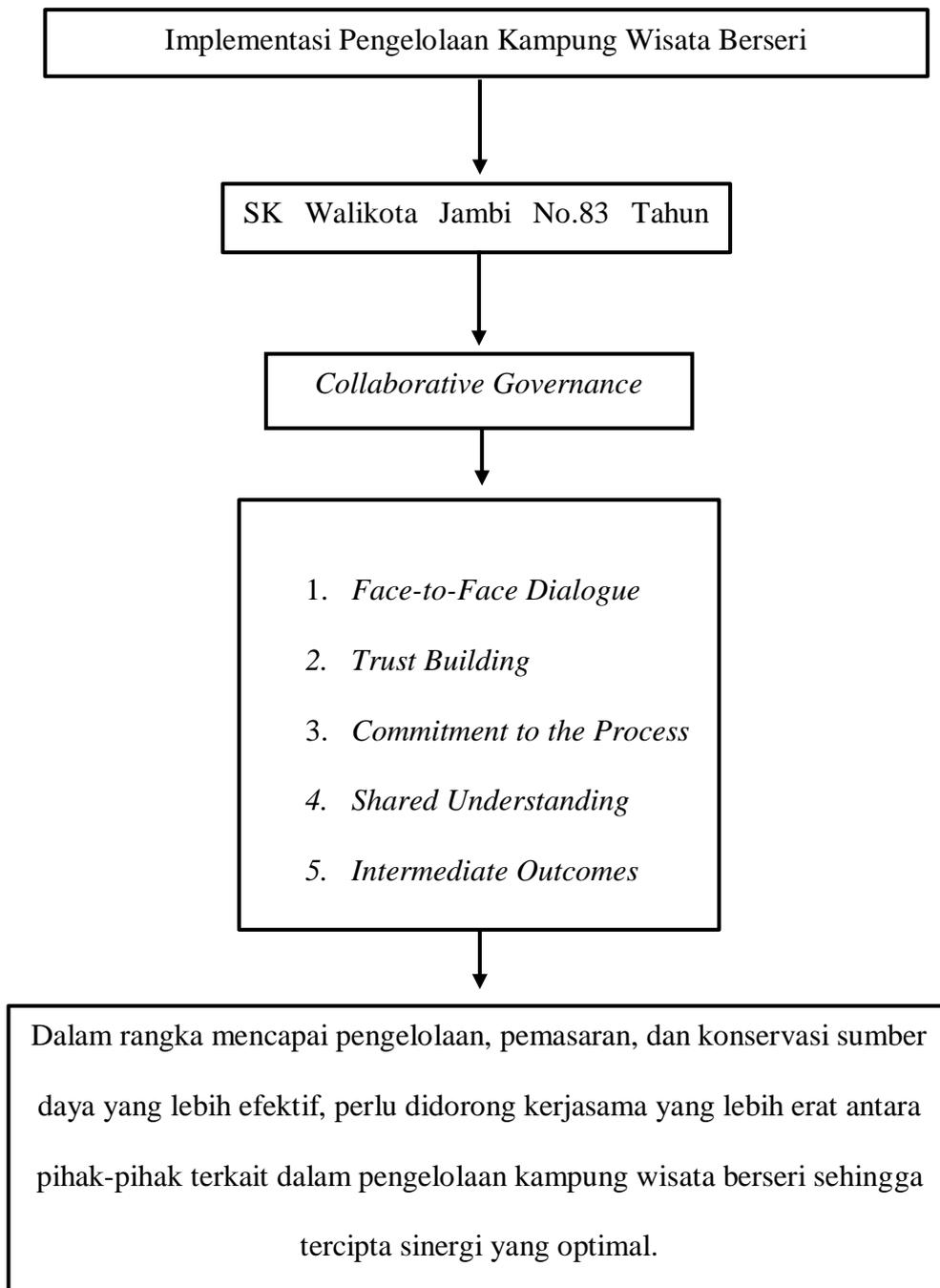
4. Pemahaman bersama (*Shared Understanding*)

Dalam pengertian ini adalah *common mission* (misi umum), *common purpose* (tujuan umum), *common objectives* (objektivitas umum) dan *shared vision* (visi bersama). Adanya pemahaman bersama merupakan syarat yang diperlukan selama proses kolaborasi, sehingga tujuan bersama dapat terwujud. Pemahaman yang dimaksud adalah penyatuan tujuan, mendefinisikan permasalahan secara bersama, sehingga meminimalisir terjadinya saling tidak mengerti atau kesalahpahaman.

5. Dampak sementara (*Intermediate Outcomes*).

Kolaborasi lebih mungkin untuk terjadi ketika tujuan dan keuntungan dari kolaborasi relatif konkret dan ketika kolaborasi kemungkinan besar akan berhasil. Meskipun *intermediate outcomes* dapat mewakili output nyata dari hal tersebut, tetapi dalam proses ini *intermediate outcomes* diartikan sebagai hasil proses yang penting untuk membangun momentum yang dapat menyebabkan keberhasilan kolaborasi. Keberhasilan ini dapat memberikan feedback ke dalam proses kolaboratif, mendorong siklus yang baik untuk membangun kepercayaan komitmen..

1.6 Kerangka Pikir



Gambar 1.1. Kerangka Pemikiran

1.7 Metode Penelitian

Langkah yang digunakan peneliti dalam mendapatkan data untuk melihat kapasitas kelembagaan dalam pengembangan kampung wisata Kelurahan Eka Jaya Kota Jambi adalah metode kualitatif karena memerlukan survey dan wawancara langsung di lapangan kepada objek penelitian terkait agar permasalahan dapat terpecahkan dan dapat di deskripsikan secara lebih.

1.7.1. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif, menurut Prof. Dr. Sugiyono Metode penelitian kualitatif dinamakan sebagai metode baru, karena popularitasnya belum lama, dinamakan metode postpositivistik karena berlandaskan pada filsafat postpositivisme. Metode ini disebut juga sebagai metode artistic, karena proses penelitian lebih bersifat seni (kurang berpola), dan disebut sebagai metode interpretive karena data hasil penelitian lebih berkenaan dengan interpretasi terhadap data yang ditentukan di lapangan.¹⁶

Menurut Poerwandari penelitian kualitatif adalah penelitian yang menghasilkan dan mengolah data yang sifatnya deskriptif, seperti transkripsi wawancara, catatan lapangan, gambar, foto rekaman video dan lain-lain.¹⁷ Penelitian kualitatif bertujuan untuk mendapatkan pemahaman yang sifatnya umum terhadap kenyataan sosial dari perspektif partisipan. Pemahaman tersebut tidak ditentukan terlebih dahulu, tetapi didapat setelah melakukan analisis terhadap kenyataan sosial yang menjadi fokus penelitian. Berdasarkan analisis

¹⁶Sugiyono. (2011). *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif dan R&D*. Bandung, Alfabeta. Hlm.7

¹⁷ Poerwandari, E. K. (2009). *Pendekatan kualitatif*. Cetakan ketiga. Depok: Lembaga Pengembangan Sarana Pengukuran dan Pendidikan Psikologi Fakultas Psikologi UI.

tersebut kemudian ditarik kesimpulan berupa pemahaman umum yang sifatnya abstrak tentang kenyataan-kenyataan.

1.7.2.Lokasi Penelitian

Guna keperluan data yang diperlukan maka peneliti mengambil lokasi penelitian di Kelurahan Eka Jaya Kota Jambi. Kemudian peneliti ingin melihat *collaborative governance* dalam pengelolaan kampung wisata berseri di Kelurahan Eka Jaya

1.7.3.Fokus Penelitian

Fokus penelitian yang diambil oleh peneliti adalah melihat proses *collaborative governance* dalam pengelolaan kampung wisata berseri di Kelurahan Eka Jaya, serta menganalisis faktor penghambat yang dihadapi dalam pengembangan kampung wisata yang ada di Kelurahan Eka Jaya.

1.7.4.Sumber Data

Sumber data adalah segala sesuatu yang dapat memberikan informasi mengenai data. Secara garis besarnya data yang digunakan dalam penelitian ini dapat diperoleh dari :

a. Data Primer

Data Primer adalah data dalam bentuk verbal atau kata- kata yang diucapkan secara lisan, gerak-gerik atau perilaku yang dilakukan oleh subjek yang dapat dipercaya.¹⁸ Data primer merupakan data tangan pertama yang

¹⁸.Sarwono, J. (2006). *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*. Yogyakarta, Graha Ilmu.

didapat dan dikumpulkan oleh peneliti langsung dari lokasi penelitian sumber data primer ini dilakukan dengan cara observasi langsung dan wawancara.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang telah dikumpulkan oleh peneliti sebelumnya yang merupakan penunjang dari data primer.¹⁹ Sumber data ini diperoleh dari bahan-bahan kepustakaan, yang berupa dokumen-dokumen, buku, jurnal, internet dan dapat diperlukan spesifik untuk kebutuhan peneliti.

1.7.5. Teknik Penentuan Informan

Pada penelitian ini peneliti menentukan informan menggunakan *Purposive Sampling*. Menurut Sugiyono, *Purposive Sampling* adalah teknik pengambilan sampel sumber data yang didasarkan dengan pertimbangan tertentu yang berkaitan dengan studi kasus yang diteliti dan tujuan peneliti.²⁰ Adapun informan yang dibutuhkan peneliti terkait objek penelitian ini meliputi;

1. Lurah Eka Jaya
2. Kepala Bidang Daya Tarik Destinasi Pariwisata Kota Jambi
3. PT Pertamina Patra Niaga-Aviation Fuel Terminal Sultan Thaha
4. Ketua Kelompok Sadar Wisata (POKDARWIS) Kelurahan Eka Jaya.
5. Masyarakat Kelurahan Eka Jaya

1.7.6. Teknik Pengumpulan Data

Guna memperoleh data yang diperlukan untuk menganalisis masalah, peneliti menggunakan teknik wawancara, observasi dan studi kepustakaan/dokumen. Keempat hal tersebut dibutuhkan peneliti untuk

¹⁹Ibid. Hlm. 210

²⁰Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung, Alfabeta. Hlm 218.

mendalami informasi dan mendapatkan data ilmiah sebagai bukti dalam penelitian. Berikut penjelasan teknik pengumpulan data yang dipilih, yaitu :

a. Observasi

Menurut Sutrisno Hadi “observasi merupakan suatu proses yang kompleks, suatu proses yang tersusun dari berbagai proses biologis dan psikologis”.²¹ Berdasarkan penjelasan diatas maka disimpulkan bahwa observasi adalah penelitian dengan melakukan pengamatan dan pencatatan dari berbagai proses yang dilakukan secara langsung maupun tidak langsung yang tampak dalam suatu gejala pada objek penelitian.

b. Wawancara

Wawancara menjadi salah satu teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data penelitian. Wawancara merupakan komunikasi dua arah untuk memperoleh informasi dari informan yang terkait. Wawancara adalah suatu kejadian atau proses interaksi antara pewawancara dan sumber informasi atau orang yang diwawancarai melalui komunikasi secara langsung atau bertanya secara langsung mengenai suatu objek yang diteliti.²² Wawancara yang dipilih oleh peneliti adalah wawancara bebas terpimpin. Wawancara bebas terpimpin adalah wawancara yang dilakukan dengan mengajukan pertanyaan secara bebas namun masih tetap berada pada pedoman wawancara yang sudah dibuat. Pertanyaan akan berkembang pada saat melakukan wawancara.²³ Tujuan

²¹Ibid. Hlm 145

²² Yusuf, A. M. (2014). *Metode Penelitian : Kuantitatif, Kualitatif & Penelitian Gabungan*. Jakarta : Prenadamedia Group. Hlm 372

²³Arikunto, S. (2016). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta : Rineka Cipta. Hlm 199

dari wawancara ini adalah untuk memperoleh informasi yang relevan dengan penelitian.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah suatu cara yang digunakan untuk memperoleh data dan informasi dalam bentuk buku, arsip, dokumen, tulisan angka dan gambar yang berupa laporan serta keterangan yang dapat mendukung penelitian.²⁴ Studi dokumen merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi atau wawancara akan lebih dapat dipercaya atau mempunyai kredibilitas yang tinggi jika didukung oleh foto-foto atau karya tulis akademik yang sudah ada.

1.7.7. Teknik Analisis Data

Sifat analisis dalam penelitian kualitatif adalah penguraian apa adanya fenomena yang terjadi (deskriptif) disertai penafsiran terhadap arti yang terkandung dibalik tampak (interpretif).²⁵ Analisa data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan analisis deskriptif, dimana tujuan dari analisis ini adalah untuk menggambarkan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta serta hubungan antara fenomena yang diselidiki. Analisa dilakukan setelah data-data yang dibutuhkan dalam penelitian ini terkumpul. Data yang di dapat mengenai Kapasitas Kelembagaan Dalam Pengembangan Kampung Wisata di Kelurahan Eka Jaya. Berdasarkan data tersebut, proses analisa penelitian ini dilakukan mulai dari membaca, mempelajari, dan menelaah data

²⁴Sugiyono.(2018). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung, Alfabeta. Hlm 476

²⁵ Mappiare, A. (2009). *Dasar-dasar Metodologi Riset Kualitatif Untuk Ilmu Sosial dan Profesi*. Malang: Jenggala Pustaka Utama Bersama Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Malang. Hlm. 80

dengan menggunakan langkah-langkah menurut Miles dan Huberman, diantaranya sebagai berikut:²⁶

1. Pengumpulan Data

Pengumpulan data yaitu mengumpulkan data di lokasi penelitian dengan melakukan observasi, wawancara dan dokumentasi dengan menentukan strategi pengumpulan data yang dipandang tepat dan untuk menentukan fokus serta pendalaman data pada proses pengumpulan data berikutnya.

2. Reduksi data

Reduksi data merupakan suatu bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu dan mengorganisasikan data sedemikian rupa sehingga diperoleh kesimpulan akhir dan di verifikasi.

3. Penyajian data

Penyajian data adalah kegiatan mengelompokkan data yang telah direduksi. Pengelompokkan data dilakukan dengan menggunakan label atau lainnya.

4. Penarikan kesimpulan (verifikasi)

Penarikan kesimpulan adalah kegiatan analisis yang lebih dikhususkan pada penafsiran data yang telah disajikan.

²⁶ Miles, Matthew B., “*Analisis data kualitatif: buku sumber tentang metode-metode baru/ Matthew B, Miles dan A. Michael Huberman; penerjemah Tjejep Rohendi Rohidi*”, (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, 19920, Hlm. 15.

1.7.8. Keabsahan Data

Triangulasi data atau keabsahan data merupakan metode pengujian data yang menggunakan sesuatu lain diluar data itu sendiri untuk melakukan pengecekan dan pembanding dari data tersebut.²⁷ Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode pengujian data melalui triangulasi sumber yaitu membandingkan dan mengecek ulang data dari yang diperoleh dari sumber yang berbeda.

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik pemeriksaan keabsahan data triangulasi dengan sumber dan triangulasi dengan metode. Menurut Patton triangulasi dengan sumber “berarti membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda dalam penelitian kualitatif”.²⁸ Sedangkan triangulasi dengan metode terdapat dua strategi, yaitu pengecekan derajat kepercayaan penemuan hasil penelitian beberapa teknik pengumpulan data dan pengecekan derajat kepercayaan beberapa sumber data dengan metode yang sama.

Dengan teknik triangulasi dengan sumber, peneliti membandingkan hasil wawancara yang diperoleh dari masing-masing sumber atau informan penelitian sebagai pembanding untuk mengecek kebenaran informasi yang didapatkan. Selain itu peneliti juga melakukan pengecekan derajat kepercayaan melalui teknik triangulasi dengan metode, yaitu dengan melakukan pengecekan hasil

²⁷Bachri, B. S. (2010). *Meyakinkan validitas data melalui triangulasi pada penelitian kualitatif*. Jurnal teknologi pendidikan, 10(1), 46-62.

²⁸Moleong, Lexy J. (2012). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung : PT Remaja Rosdakarya. Hlm 330

penelitian dengan teknik pengumpulan data yang berbeda yakni wawancara, observasi, dan dokumentasi sehingga derajat kepercayaan data dapat valid.